

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kota metropolitan di Indonesia. Jakarta juga merupakan Ibukota negara yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Dengan perekonomian yang terus berkembang dengan pesat, hal ini berdampak dengan meningkatnya lapangan pekerjaan di Jakarta. Lapangan pekerjaan yang meningkat berdampak pada jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan kebutuhan akan sumber daya manusia ini mendorong peningkatan perpindahan penduduk ke Jakarta. Banyak masyarakat yang pergi ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Jumlah penduduk di Jakarta tahun demi tahun terus meningkat, sedangkan lahan yang ada di Jakarta semakin tidak cukup untuk menampung kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk setiap masyarakatnya. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong adanya reklamasi pantai yang merupakan salah satu upaya perluasan pantai guna memenuhi kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat di DKI Jakarta.

Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Pada Tahun 2018 Terjadi Kenaikan Kenaikan Jumlah Penduduk DKI Jakarta Yang Cukup Drastis Dibandingkan Dengan Tahun 2010 di setiap Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Menurut Wilayah (2018)

Kab/Kota	2010			
	3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan			
	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
Kep Seribu	21.08	02.03	00.22	2432
Jakarta Selatan	2062.23.00	01.46	21.46	14598
Jakarta Timur	2693.90	01.38	28.04.00	14327
Jakarta Pusat	902.97	00.32	09.40	18761
Jakarta Barat	2281.95	0,099305556	1,010416667	17616
Jakarta Utara	1645.66	01.49	17.13	11221
DKI Jakarta	9607.79	01.42	100	14506

Kab/Kota	2018			
	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan			
	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
Kep Seribu	24.13.00	0,089583333	00.23	2774
Jakarta Selatan	2246.14.00	01.06	21.46	15900
Jakarta Timur	2916.02.00	0,068055556	27.86	15508
Jakarta Pusat	924.69	00.29	0,390972222	19212
Jakarta Barat	2559.36.00	01.43	24.45.00	19757
Jakarta Utara	1747.31.00	01.10	17.17	12255
DKI Jakarta	10467.63	01.07	100	15804

(sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 2018)

Untuk mengatasi peningkatan jumlah penduduk ini pemerintah merencanakan untuk mereklamasi pantai utara Jakarta yang rencana pembangunannya sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto namun baru terlaksana pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yaitu sekitar tahun 2014 (<https://megapolitan.kompas.com/>).

Menurut Peta Reklamasi Teluk Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lama menerbitkan izin untuk pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta kepada sejumlah perusahaan. Meski mendapat pertentangan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan tetap melanjutkan proyek ini seluas kurang lebih 4 ribu hektar. Pada peta ini pun dijelaskan bahwa PT. Kapuk Naga Indah memiliki 5 pulau yaitu Pulau A,B,C,D,E 3 pulau dalam tahap izin prinsip yaitu pulau A,B, dan E, 2 pulau dalam tahap proses reklamasi yaitu pulau C dan D; PT. Jakarta Propertindo memiliki 1 pulau yaitu pulau F dalam tahap izin pelaksanaan; PT. Muara Wisesa Samudra memiliki 1 pulau yaitu pulau G dalam tahap proses reklamasi; PT. Harapan Indah memiliki 1 pulau yaitu pulau H dalam tahap izin pelaksanaan; PT. Jaladri Kartika Ekapaksi memiliki 1 pulau yaitu pulau I dalam tahap izin pelaksanaan; PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk memiliki 2 pulau yaitu pulau J dan K keduanya dalam tahap izin prinsip; PT. Manggala Krida Yudha memiliki 2 pulau yaitu pulau L dan M keduanya dalam tahap izin prinsip; PT. Pelindo II memiliki 1 pulau yaitu pulau N dalam tahap proses reklamasi; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 pulau yaitu pulau O,P, dan Q ketiganya dalam tahap izin prinsip.

Gambar 1.1
Peta Reklamasi Teluk Jakarta



(sumber: [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160406181446-23-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160406181446-23-122179/peta-reklamasi-teluk-jakarta)

[122179/peta-reklamasi-teluk-jakarta](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160406181446-23-122179/peta-reklamasi-teluk-jakarta)

Gambar 1.2
Grafis pulau buatan hasil reklamasi di Teluk Jakarta dan pemanfaatannya



(sumber: <https://geotimes.co.id/>)

Upaya mendukung pembangunan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.26 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D Dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Ada 9 pengembang yang memenangkan tender ini yaitu (PT. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT. Pelindo II, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pembangunan Jaya Ancol, PT. Kapuk Indah Naga, PT. Jaladri Kartika Ekapaksi, PT. Taman Harapan Indah, PT. Muara Wisesa Samudra, PT. Jakarta Propertindo), namun hanya 2 pengembang yang memiliki izin untuk membangun reklamasi yaitu PT. Kapuk Indah Naga yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu yang diberikan izin sejak masa kepemimpinan Fauzi Bowo dan PT. Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro yang diberikan izin pada masa kepemimpinan Basuki Tjahjaja Purnama atau Ahok (<https://megapolitan.kompas.com/>).

Proyek ini sempat terhenti pada saat Ahok turun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI yang bernama Mohamad Sanusi juga tertangkap

oleh KPK karena dugaan korupsi proyek reklamasi ini. Penangkapan ini yang membuat kasus ini sempat menjadi sorotan publik, selain itu banyak pihak yang menolak dan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai pembangunan ini. Diduga terbitnya pergub ini dikarenakan adanya perjanjian tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu pertemuan tertutup dan terdapat kedekatan yang sudah berlangsung lama antara Ahok, Bos Agung Sedayu dan Bos Podomoro Grup yang membuat proyek ini terus berjalan. Terbitnya pergub ini pun menuai kontroversi di kalangan masyarakat namun tidak memberi pengaruh apa-apa dan proyek ini tetap berjalan.

Tentunya kabar ini dibantah oleh Ahok sendiri saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Negeri Tipikor pada Senin (5/9/2016). Ahok mengungkapkan bahwa ia mengenal kedua bos pengembang ini karena mereka bertentangan dan kerap bertemu dalam aktivitas sehari-hari. Ahok juga mengaku dalam pertemuan non-formal tak pernah membahas mengenai kontribusi tambahan di proyek reklamasi dan beliau merasa terkhianati saat kasus korupsi ini menyebutkan namanya (<https://news.detik.com/>)

Kasus ini ditolak dengan tegas oleh beberapa aktivis lingkungan hidup karena menurut mereka rencana reklamasi ini akan mencemari lingkungan sekitar dan menghancurkan ekosistem bawah laut. Limbah dari hasil pembangunan pulau reklamasi juga belum dikelola dengan baik oleh para pekerja, hal ini membuat resah masyarakat sekitar pulau reklamasi. Pulau reklamasi letaknya juga berdekatan dengan hutan bakau yang ada di pantai utara. Ketika air pasang maka akan terlihat seperti air laut pada umumnya sedangkan ketika air sedang surut

maka yang terlihat hanya genangan lumpur dari hasil pembangunan pulau reklamasi.

Gambar 1.3
Unjuk Rasa dari WALHI Jakarta



(sumber: <https://news.detik.com/foto-news/d-4612255/walhi-tolak-reklamasi-teluk-jakarta/6>)

Selain berdampak dengan lingkungan, reklamasi juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Pendapatan para nelayan menurun drastis karena ikan-ikan yang dulunya ada di perairan dangkal saat ini sudah tidak ada, walaupun ada itu pun sangat sedikit jumlahnya sedangkan modal untuk melaut

sangat besar. Permasalahan awal yang muncul dari keresahan para nelayan karena pendapatan melaut mereka yang kian hari kian menurun, belum mendapatkan respon apa-apa dari pemerintah DKI Jakarta sehingga mereka tetap melaut walaupun hasil yang mereka dapatkan tidak seberapa dibandingkan modal yang mereka keluarkan untuk sekali melaut. Ada juga beberapa nelayan yang pada akhirnya beralih profesi sebagai penambak kerang hijau, sebagai *tour guide* untuk menyambung hidup mereka daripada bertahan menjadi nelayan.

Proyek reklamasi telah menimbulkan “ketidakadilan ruang” bagi masyarakat pesisir karena ruang akses dan hak hidup mereka diambil alih dengan dalih untuk kepentingan ekonomi bagi pemodal besar tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat pesisir yang dijamin oleh undang-undang.

Namun dalam hal ini pemerintah tetap bersikeras bahwa reklamasi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki pariwisata, mencegah banjir, lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya sehingga pembangunan pulau reklamasi terus berjalan. Peran pemodal dalam proses pembangunan reklamasi ini juga sangat besar karena pembangunan reklamasi ini bernilai triliunan rupiah yang tentu akan membuat kantong para pengusaha semakin membengkak nantinya apabila pembangunan ini selesai dan dibangun gedung-gedung untuk tempat tinggal dan wahana rekreasi yang tentunya hanya kalangan menengah ke atas yang dapat menikmatinya. Kesenjangan antara kaum

borjuis dan kaum *proletar* akan semakin terlihat jauh, masyarakat sekitar nantinya akan semakin tergusur dari tempat tinggal mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “Relasi Kuasa Pengusaha, Negara dan Masyarakat dalam studi kasus Reklamasi Teluk Jakarta”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

Bagaimana relasi kuasa antara pengusaha, negara dan masyarakat pada kasus reklamasi di Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Dari rumusan masalah, penulis membatasi masalah mengenai bagaimana relasi kuasa yang ada dalam lingkaran pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran secara lengkap mengenai bagaimana relasi kuasa antara pengusaha, negara dan masyarakat pada kasus reklamasi di Jakarta.

2. Tujuan khusus

Yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang : Mengetahui bagaimana relasi kuasa antara pengusaha, negara dan masyarakat pada kasus reklamasi di Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis Ilmu Politik, khususnya mengenai bagaimana relasi kuasa antara pengusaha, negara dan masyarakat pada kasus reklamasi di Jakarta dan pada akhirnya penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan referensi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa antara pengusaha, negara dan masyarakat pada kasus reklamasi di Jakarta, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat.